

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era perkembangan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk menjaga kinerja keuangannya agar dapat terus bertahan dalam jangka panjang. *Financial performance* (kinerja keuangan) yang optimal akan memastikan perusahaan memiliki sumber daya yang memadai agar mampu mengembangkan perusahaan serta memenuhi kewajiban *financial* nya. Bagi perusahaan, penting memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk mendapatkan laba dan meningkatkan prestasi perusahaan (Chu, 2021). Dengan demikian, keberhasilan sebuah perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan ekonominya dapat dilihat melalui kinerja keuangan (*financial performance*) yang berperan sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan tersebut (Al-Mari & Mardini, 2024).

Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan dapat mempertahankan kinerja keuangannya. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan sektor sumber daya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024, terdapat fluktuasi laba yang cukup signifikan. Seperti yang terjadi pada PT. Dian Swatatika Sentosa Tbk yang mencatat rugi bersih hingga Rp 1,18 triliun di tahun 2020, berbalik dari laba Rp 698,1 miliar di 2019, hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan konsolidasi hingga 7% dan penurunan

segmen batubara domestik sampai hampir 30% (Dityasa H. Forddanta, 2020). Kasus serupa juga terjadi pada PT Bumi Resources Tbk di tahun 2020, dengan mencatat rugi sebesar US\$ 338,02 atau setara Rp 4,77 triliun, padahal tahun sebelumnya masih memperoleh laba bersih senilai US\$ 6,84 juta. Kerugian tersebut disebabkan oleh kombinasi dari penurunan pendapatan, pelemahan harga batubara global, serta tekanan operasional akibat pandemi COVID-19 (Hendra Kusuma, 2021). Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan yang berada di sektor sumber daya cukup rentan terhadap dinamika eksternal seperti harga komoditas, permintaan pasar global, serta kebijakan pemerintah.

Fluktuasi kinerja keuangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan operasional tetapi juga dipengaruhi oleh isu non-keuangan yang semakin relevan, terutama faktor lingkungan. Perubahan iklim, tekanan dari regulator, serta tuntutan pasar terhadap bisnis yang berkelanjutan semakin mendorong perusahaan untuk memperhatikan dampak operasionalnya terhadap lingkungan. Saat ini, isu lingkungan telah menjadi perhatian yang terus berkembang, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Masalah seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan menipisnya sumber daya alam berdampak serius tidak hanya pada lingkungan tetapi juga pada tingkat ekonomi dan sosial. Salah satu faktor utama dari persoalan tersebut adalah emisi karbon (*carbon emission*), yang menjadi kontributor signifikan terhadap perubahan iklim. Emisi ini dihasilkan dari pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer

yang bersumber dari berbagai aktivitas manusia seperti konsumsi energi berbahan bakar fosil, kegiatan produksi, serta sektor transportasi (Aydingülü Sakalsız & Özçelik, 2024).

Data dari Worldometer dalam *CO2 Emissions by Country* (2024) mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil emisi karbon terbesar keenam di dunia pada tahun 2022. Melihat kondisi ini, Indonesia perlu melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian terhadap peningkatan emisi karbon. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Emisi karbon membawa dampak yang merugikan kehidupan manusia, seperti perubahan iklim yang tidak menentu. Upaya untuk mengurangi emisi karbon diperlukan untuk mencegah kondisi lingkungan yang semakin memburuk, perusahaan mulai diwajibkan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan emisi karbon (Nilasakti et al., 2024).

Pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) merupakan salah satu bentuk pelaporan lingkungan yang memuat data mengenai perhitungan, pencatatan, serta penyajian emisi karbon. Laporan ini mencakup informasi terkait kinerja karbon baik di masa lalu maupun proyeksi ke depan yang ditujukan bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Selain itu, pengungkapan

tersebut juga dapat berisi informasi lain yang berkaitan dengan iklim, seperti penjelasan kualitatif mengenai pandangan atau strategi perusahaan dalam menurunkan emisi karbon (Pitrakkos & Maroun, 2020). Pengungkapan karbon dapat bersifat sukarela ataupun wajib (Velte et al., 2020). Di beberapa negara pengungkapan emisi karbon bersifat wajib untuk mengurangi persepsi buruk pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Patricia et al., 2021). Di Indonesia, pengungkapan emisi karbon tidak lagi sepenuhnya bersifat sukarela, khususnya bagi perusahaan publik dan lembaga jasa keuangan yang diwajibkan menyusun laporan keberlanjutan yang memuat informasi kinerja lingkungan, termasuk aspek emisi karbon. Namun demikian, implementasi kewajiban tersebut masih menunjukkan variasi antarperusahaan, sehingga pengungkapan emisi karbon belum sepenuhnya optimal dan konsisten.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, *carbon emission disclosure* (pengungkapan emisi karbon) memiliki keterkaitan dengan *financial performance* (kinerja keuangan) perusahaan. Pengelolaan dan pengendalian emisi karbon mencerminkan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya yang lebih optimal, sehingga berpotensi menekan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat emisi karbon yang lebih rendah atau pengungkapan emisi yang lebih baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih tinggi, yang tercermin dalam peningkatan profitabilitas dan nilai perusahaan (Setiani et al., 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, di Indonesia juga menemukan bahwa pengungkapan emisi karbon berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan, karena transparansi lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, serta memperkuat reputasi perusahaan di pasar modal. Dengan demikian, pengungkapan emisi karbon tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban pelaporan, tetapi juga sebagai strategi yang berpotensi mendukung pencapaian kinerja keuangan perusahaan (Safutri et al., 2023).

Beberapa studi sebelumnya yang mengkaji dampak pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) terhadap kinerja keuangan menemukan hasil yang tidak konsisten. Beberapa studi menemukan dampak positif atau signifikan pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja keuangan (Al-Mari & Mardini, 2024; Emmanuel et al., 2023; Hardiyansah et al., 2021; Lina & Adelia, 2025). Sementara studi lain, misalnya (Brilliani, Setianingtyas Honggowati & Budiwati, 2023; Paradilla et al., 2025; Siddique et al., 2021) menunjukkan dampak negatif. Dan beberapa studi lainnya menunjukkan tidak ada dampak (Ladista et al., 2023; Safutri et al., 2023).

Meskipun pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) menunjukkan pengaruh yang beragam terhadap kinerja keuangan, akan tetapi hubungan tersebut tidak dapat dipandang sebagai mekanisme yang berdiri sendiri. Faktor eksternal maupun internal, terutama mekanisme tata kelola perusahaan sering kali memoderasi dampak *carbon emission disclosure* terhadap kinerja

keuangan. Dalam konteks ini, kepemilikan institutional (*institutional ownership*) menjadi sangat penting sebagai variabel moderasi.

Kepemilikan institutional (*institutional ownership*) merujuk kepada kepemilikan saham oleh institusi yang bergerak di bidang keuangan, nonkeuangan, atau badan hukum lainnya yang biasanya berbentuk entitas, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, dan reksadana (Rosmawati, 2025). Kepemilikan institusional cenderung memiliki orientasi jangka panjang dan tekanan untuk memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Pemegang saham institutional (*institutional ownership*) tidak hanya memantau kinerja keuangan, tetapi juga memberikan tekanan kepada manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi non-keuangan, termasuk pelaporan emisi karbon dan kinerja lingkungan lainnya sebagai bentuk pengelolaan risiko reputasi dan tanggapan terhadap tuntutan regulasi serta pemangku kepentingan (Zeng et al., 2025).

Selain dapat berperan dalam mendorong praktik keberlanjutan dan pengungkapan lingkungan, kepemilikan institusional (*institutional ownership*) juga memiliki keterkaitan dengan *financial performance* (kinerja keuangan) perusahaan. *Institutional ownership* (kepemilikan institusional) umumnya memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen melalui fungsi monitoring yang intensif, sehingga mampu mengurangi konflik kepentingan, menekan biaya agensi, serta mendorong

efisiensi operasional perusahaan (Evalina & Gusni, 2024). Kondisi tersebut berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan yang tercermin dalam indikator profitabilitas dan efisiensi aset, seperti *Return on Asset* (ROA), sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah penelitian empiris pada perusahaan publik di Indonesia yang menemukan pengaruh positif *institutional ownership* (kepemilikan institusional) terhadap *financial performance* (kinerja keuangan) (Lailatussaripah & Wahyuningsih, 2025). Di sisi lain, hubungan ini bersifat dua arah, dimana tren kinerja keuangan perusahaan turut memengaruhi keputusan investasi *institutional ownership*, peningkatan kinerja cenderung mendorong penambahan atau mempertahankan kepemilikan saham, sedangkan penurunan kinerja dapat memicu penyesuaian portofolio atau tekanan terhadap manajemen untuk memperbaiki efisiensi dan profitabilitas perusahaan (Sudjinan et al., 2024).

Secara empiris, bukti mengenai peran moderasi *institutional ownership* bersifat beragam, sehingga memerlukan untuk penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian oleh (Brilliani, Setianingtyas Honggowati & Budiwati, 2023) menunjukkan bahwa *institutional ownership* mampu memoderasi pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah et al., 2024) menunjukkan hasil bahwa tidak semua investor institusional memprioritaskan isu lingkungan, sebagian lebih mementingkan imbal hasil jangka pendek sehingga pengaruh moderasi menjadi lemah atau bahkan kontraproduktif.

Dalam konteks perusahaan sumber daya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, struktur kepemilikan saham umumnya masih menunjukkan konsentrasi pada pemegang saham pengendali, sehingga proporsi kepemilikan institusional belum selalu menjadi kepemilikan mayoritas. Kondisi ini menjadikan peran moderasi *institutional ownership* semakin relevan untuk dikaji, terutama pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan tekanan regulasi lingkungan, seperti penerapan Perpres No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Masalah dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya tentang bagaimana *carbon emission disclosure* dapat mempengaruhi *financial performance*, dengan *institutional ownership* sebagai variabel moderasi. Dan menjadikan perusahaan sumber daya yang terdaftar di BEI periode 2020-2024 sebagai objek penelitian. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menggunakan perusahaan energi dan pertambangan dan penelitian ini menggunakan variabel moderasi untuk menganalisis pengaruh *carbon emission disclosure* (CED) terhadap *financial performance* (kinerja keuangan).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Carbon emission disclosure* Terhadap *Financial Performance*: *Institutional ownership* sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Merujuk dari latar belakang masalah diatas, maka fokus permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *carbon emission disclosure* berpengaruh terhadap *financial performance* pada perusahaan sektor sumber daya yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
2. Apakah *institutional ownership* dapat memoderasi pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap *financial performance* pada perusahaan sektor sumber daya yang terdaftar di BEI 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap *financial performance* pada perusahaan sektor sumber daya yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
2. Untuk menganalisis peran moderasi *institutional ownership* dalam memperkuat dan memperlemah pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap *financial performance* perusahaan sektor sumber daya yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan literatur mengenai akuntansi keberlanjutan, khususnya terkait hubungan antara *carbon emission disclosure* dan *financial performance* dengan *institutional ownership* sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas pengetahuan mengenai tata kelola perusahaan dan *carbon emission disclosure* di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan teoritis bagi perusahaan mengenai pentingnya pengungkapan emisi karbon sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan pengelolaan risiko lingkungan. Dengan memahami hubungan *carbon emission disclosure* dan *financial performance* serta peran *institutional ownership*, perusahaan dapat mengembangkan praktik tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan legitimasi sosialnya di mata pemangku kepentingan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kerangka teori investasi berkelanjutan dengan menelaah *carbon emission disclosure* memengaruhi nilai

dan *financial performance*. Pengetahuan ini membantu investor memahami risiko dan peluang yang terkait dengan investasi di perusahaan yang proaktif dalam keberlanjutan lingkungan, sehingga mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih baik.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar teoritis untuk perumusan kebijakan publik yang efektif dalam mendorong keterbukaan informasi pengelolaan emisi karbon oleh perusahaan. Dengan memahami bagaimana pengungkapan karbon, kepemilikan institutional berinteraksi mempengaruhi kinerja keuangan, pemerintah dapat merancang regulasi yang lebih tepat sasaran demi mendorong perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang akuntansi lingkungan dan *corporate governance* dengan memperkenalkan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dalam studi pengungkapan emisi karbon. Hasil studi ini membuka peluang penelitian selanjutnya dan pengembangan teori yang mengaitkan aspek keberlanjutan, transparansi korporasi, dan kinerja keuangan pada konteks perusahaan di pasar berkembang.